



**Penguatan *Financial Performance* dan *Poverty Reduction*
Melalui Literasi Keuangan di Industri Keuangan Non Bank
(IKNB) Syariah Pada Masyarakat Jawa Tengah**

Joko Robi Prasetyo

Institut Agama Islam Negeri Suarakarta Indonesia

maskarebet300@gmail.com

Supriyanto

Institut Agama Islam Negeri Suarakarta Indonesia

Supriyanto.mud@gmail.com

Budi Sukardi

Institut Agama Islam Negeri Suarakarta Indonesia

budizuredy@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of accessibility directly on financial performance, the effect of indirect accessibility on financial performance through poverty reduction, the effect of direct availability on financial performance, the effect of indirect availability on financial performance through poverty reduction, the effect of direct usefulness on financial performance, the effect of indirect use on financial performance through poverty reduction, the effect of financial performance directly on poverty reduction. This research was conducted in the Islamic non-bank financial industry (IKNB) in the Central Java region which is incorporated in the OJK Sharia Financial Statements and Central Java BPS Reports. The results of the study are accessibility does not directly affect financial performance ($p.0,318 > 0.05$). Availability does not directly affect financial performance, this is evidenced by the statistical t value ($p.0,605 > 0.05$). Usability does not directly affect financial performance, this is evidenced by the statistical t value ($p.0,456 > 0.05$). Financial performance does not directly affect poverty reduction, this is evidenced by the statistical t value ($p.0,153 > 0.05$).

Keyword : IKNB, *Performance Financial*, *Poverty Reduction*.

DOI: 10.22515/jfib.v2i2.1942

Pendahuluan

Industri Keuangan non Bank atau biasa disingkat dengan istilah IKNB, terdiri dari asuransi, pembiayaan modal ventura, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), dan sarana multi infrastruktur (SMI). Industri Keuangan non Bank adalah industri keuangan di luar perbankan dan pasar modal yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung.

Industri Keuangan non Bank memiliki peran dalam perekonomian yaitu pembiayaan, proteksi atas kerugian keuangan, penyertaan modal sementara, investasi, dan bantuan likuiditas, serta ada sekitar 140 perusahaan IKNB. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, terdapat karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Walaupun perkembangan total aset Industri Keuangan non Bank Syariah Rp. 93 triliun per April 2017, dengan rata-rata *year on year* 28%. Banyak permasalahan strategis yang dihadapi oleh IKNB syariah, yaitu industri dan skala ekonomi relatif masih kecil, kesenjangan skala bisnis yang cukup besar, tingginya

tingkat interdependensi antara IKNB syariah dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah inovasi produk dan keberagaman layanan masih minim dan kanal distribusi maupun sebaran kantor cabang atau pemasaran masih terpusat di pulau Jawa, kelengkapan pengaturan, jumlah, pelaku, skala ekonomi dan kesiapan SDM masih kurang, serta tingkat pemahaman dan preferensi masyarakat terhadap IKNB syariah masih belum luas. Padahal seharusnya, industri keuangan syariah harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil, menengah hingga skala pembiayaan yang besar untuk menunjang pembangunan nasional. Hal inilah yang menegaskan bahwa pentingnya masyarakat untuk mengetahui literasi keuangan agar dapat meningkatkan pendapatan dan memahami tujuan serta maksud keuangan individu dan keluarga dalam era modern.

Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi kerjasama regional-multilateral seperti G20, OECD, *the World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif (*financial inclusion*).

Literasi keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, yang diawali dengan mengetahui, kemudian meyakini, hingga menjadi terampil untuk terlibat aktif, dengan kata lain mencapai masyarakat yang *well literate* pada sektor jasa keuangan; yakni bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pegadaian. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memahami

literasi keuangan secara baik dan benar, maka akan tersingkirkan dalam arus perekonomian artinya masyarakat tersebut akan lamban dalam mengakses jasa keuangan. Banyaknya masyarakat yang sebenarnya membutuhkan pendanaan atau modal, belum diimbangi dengan pendidikan dan pemahaman mengenai cara peminjaman di lembaga keuangan, kesesuaian produk yang ditawarkan, apalagi pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Terbukanya akses masyarakat terhadap jasa keuangan, berdampak pada masyarakat bisa memanfaatkan akses dan meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran pinjaman oleh lembaga keuangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil hanya mampu mengandalkan laba untuk meneruskan usahanya, hal ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat.

Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014)

Penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam

pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Khasnobis dan Mavrotas (2008), mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah merupakan masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam literasi keuangan, karena dengan memberikan pemahaman finansial atau keuangan yang baik maka akan memberikan peningkatan pendapatan ekonomi yang baik bagi masyarakat tersebut, membuat perubahan sosial tatanan hidup, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

Seruan untuk mendorong pertumbuhan inklusif di Asia telah muncul sejak pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan (Klassen, 2010). Pertumbuhan dengan kesenjangan yang terus berlangsung dalam sebuah negara dapat menyebabkan kegaduhan sosial dan politik serta mendorong terjadinya tindak kriminal dari kelompok masyarakat yang merasa haknya (untuk hidup layak) tercabut (ADB, 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidaklah cukup untuk memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep inklusifitas kemudian muncul sebagai kebijakan utama untuk terus didorong dan khususnya untuk juga memasukkan kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan menjadi miskin.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang semakin baik, ternyata belum dapat mensejahterakan masyarakat, dimana kemiskinan masih menjadi persoalan dalam perekonomian Jawa Tengah dengan angka tingkat kemiskinan 4,5 juta penduduk miskin. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena ketimpangan di Jawa Tengah yang setiap tahun semakin meningkat.

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah ekonomi-sosial yang masih menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan.

Untuk menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan di atas, maka akan dilakukan pengkajian apakah aksesibilitas berpengaruh secara langsung terhadap *performance financial* ?, apakah aksesibilitas berpengaruh secara tidak langsung terhadap *performance financial* melalui *poverty reduction* ?, apakah ketersediaan berpengaruh secara langsung terhadap *performance financial* ?, apakah ketersediaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap *performance financial* melalui *poverty reduction* ?, apakah kegunaan berpengaruh secara langsung terhadap *performance financial* ?, apakah kegunaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap *performance financial* melalui *poverty reduction* ?, dan apakah *Performance financial* berpengaruh secara langsung terhadap *poverty reduction* ?

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengulas permasalahan penelitian ini yaitu, penelitian dengan tema *The Role of Financial Inclusion to Poverty Reduction in Indonesia*, oleh Anas Iswanto Anwar dkk, yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan sebuah fenomena baru yang dikaitkan dengan kemiskinan di Indonesia. Data dalam penelitian ini memakai data panel dari tahun 2005 sampai dengan 2013 pada 31 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap investasi bahkan pada pertumbuhan ekonomi dan perbedaan investasi yang tinggi antara di Jawa dan Sumatera serta rendahnya angka kemiskinan di pulau-pulau lain di Indonesia.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Levshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses *benefit* dari sektor keuangan dan memberikan kerugian

kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan dikarenakan kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.

Riset yang dilakukan oleh Mohammed Avais, ia menjelaskan bahwa banyaknya perubahan pada sektor keuangan memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi. Inovasi keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengkomodir kepentingan masyarakat miskin dengan membuat produk unggulan yang sebagian besar penduduk adalah petani agar mendukung pembangunan berkelanjutan. Produk dan inovasi keuangan yang dibuat untuk masyarakat miskin membantu dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan.

I Made Sanjaya (2014) melakukan penelitian tentang keuangan inklusif dan pertumbuhan inklusif sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2007-2010. Dalam penelitian ini Indeks Pertumbuhan Inklusif (IPI) digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IIK), Indeks Harga Konsumen (IHK), rasio penyaluran kredit mikro dan menengah terhadap PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia.

Beberapa penelitian lain juga menekankan pentingnya keterkaitan antara penguatan sektor keuangan dan penurunan kemiskinan, misalnya studi oleh Beck et al (2004), Green et al (2006), Honohan (2004), dan Claessen dan Feijen (2006). Ahmad dan Malik (2009), mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem keuangan dapat menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Levina, 1997).

Irmawati Setyani (2013) meneliti tentang penerapan model keuangan inklusif pada UMKM berbasis pedesaan di Kabupaten Klaten.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model keuangan inklusif untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta *advertisement*.

Job Pristine Migap, dkk (2015) melakukan penelitian tentang keuangan inklusif untuk pertumbuhan inklusif menurut perspektif Nigeria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu Indeks pertumbuhan inklusif dan indikatorindikator keuangan inklusif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa keuangan inklusif diperlukan untuk pertumbuhan inklusif di Nigeria, peningkatan penyebaran *mobile banking* dan layanan internet oleh lembaga keuangan meningkatkan akses terhadap perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya begitu pula dengan partisipasi aktif dari lembaga pendidikan guna meningkatkan literasi keuangan.

Dari Beberapa penelitian di atas, terlihat masih mengkaji aspek inklusi keuangan bukan pada aspek literasi keuangan, serta cakupan penelitian masih membahas tentang pengentasan kemiskinan, berbeda dengan penelitian ini dengan lebih membahas pada aspek literasi keuangan dan dampaknya *financial performance* dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan demikian permasalahan literasi keuangan, *finacial performance* dan mengurangi kemiskinan pada Industri keuanga non bank syariah menarik untuk dikaji.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian *eksploratoris*-deskriptif-kuantitatif. Penelitian dilakukan di industri keuangan non bank (IKNB) syariah, yaitu perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah di wilayah Jawa Tengah. Populasi penelitian dilakukan di Industri Keuangan non Bank (IKNB) Syariah di wilayah Jawa Tengah yang tergabung dalam Laporan Keuangan Syariah OJK dan Laporan BPS Jawa Tengah.

Sampel dalam penelitian yaitu Laporan Keuangan Syariah OJK dari perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah di daerah Jawa Tengah serta Laporan BPS Jawa Tengah dari Tahun 2012 - 2017.

Data dalam penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*), laporan *Good Corporate Governance* (GCG), yang dipublikasi oleh OJK serta data-data pendukung lainnya seperti laporan kegiatan sosial industri keuangan non bank syariah. Adapun data primer diperoleh dari para ahli lembaga keuangan syariah (DPS, IAEI), pejabat struktural pemerintah dan pengambil kebijakan (BI, OJK, Kemenkeu) di lembaga keuangan syariah melalui wawancara atau FGD (*focus group discussion*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Industri Keuangan Non Bank Syariah Jawa Tengah

Industri keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi asuransi, gadai, penjaminan dan lain sebagainya. Industri keuangan non bank secara sistem memiliki dua jenis, yaitu konvensional dan syariah. Industri keuangan non bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya dijalankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Kantor jaringan industri keuangan non bank syariah di provinsi Jawa Tengah telah tersebar kurang lebih 150 kantor diseluruh kabupaten/kota yang terdiri dari kantor cabang/kantor perwakilan atau kantor agen. Kantor-kantor jaringan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat disetiap kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Industri keuangan non bank syariah yang telah hadir di wilayah Jawa Tengah antara lain, pegadaian, asuransi syariah, multifinance, lembaga modal ventura dan lembaga dana pensiun.

2. *Performance Financial* IKNB Syariah dan Kemiskinan Jawa Tengah

Aset IKNB Syariah secara nasional sudah mencapai kurang lebih sekitar Rp 99 triliun. Aset ini tumbuh sekitar 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan *performance financial* pada IKNB Syariah. Pada tahun 2018 ini OJK meramalkan aset IKNB Syariah akan tumbuh sekitar 12% dan pangsa pasar juga diramalkan akan tumbuh hingga mencapai 5%.

Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2017 sebanyak 4.197.490 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan pada bulan Maret 2017 yang sebesar 4.450.720 orang. Jumlah penduduk miskin ini tersebar di 823 desa. Penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh inklusifitas keuangan. Akses keuangan terhadap masyarakat yang kurang mampu dapat menumbuhkan perekonomian yang disebabkan oleh mudahnya masyarakat dalam mengakses permodalan melalui lembaga keuangan.

3. Analisis Regresi Model Pertama

Analisis regresi model pertama dilakukan untuk menganalisis sejauhmana kekuatan dan hubungan dari masing-masing variabel bebas (*inkusi keuangan*) terhadap variabel mediasi (*performance financial*). Adapun persamaan struktur dari analisis regresi model pertama adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Performance Financial} = & b_1 \text{ Aksesibilitas} + b_2 \\
 & \text{Ketersediaan} + b_3 \text{ Penggunaan} \\
 & + e_1
 \end{aligned}$$

Adapun hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Coefficients ^a			
	Unstandardized	Standardized	Sig
Model	Coefficients	Coefficients	t
			.

		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,429	8,345		,051 ,964
	Access	2,381	1,805	,714	1,319 ,318
	Avail	-,749	1,230	-,356	-,609 ,605
	Usefull	,130	,142	,160	,917 ,456

a. Dependent Variable: Asset

Dari hasil pengujian tersebut, terlihat persamaan regresi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,429 + 2,381 X_1 - 0,749 X_2 + 0,130 X_3 + e_1$$

Keterangan :

Y_1 = Aset (*Performance Financial*)

X_1 = Aksesibilitas

X_2 = Ketersediaan

X_3 = Penggunaan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial atau secara individual, keseluruhan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel *performance financial*. Variabel aksesibilitas dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **2,381** dan nilai signifikan **0,318 > 0,05**, yang artinya Aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *performance financial*.

Variabel ketersediaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,749** dan nilai signifikan **0,605 > 0,05**, yang artinya

Ketersediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *performance financial*. Variabel penggunaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **0,130** dan nilai signifikan **0,456 > 0,05**, yang artinya Penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *performance financial*.

Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) model pertama, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana dan seberapa besar kemampuan variabel bebas (aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan) secara keseluruhan dalam menjelaskan variabel *performance financial*, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,983 ^a	,967	,917	,06784

a. Predictors: (Constant), Usefull, Access, Avail

Sumber : data primer diolah, 2018

Hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa besarnya **R Square** adalah **0,917** atau **91,7%**. Dengan demikian variabel *performance financial* dapat dijelaskan oleh variabel aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan sebesar **91,7%** dan **8,3%** dijelaskan oleh variabel diluar model tersebut.

4. Analisis Regresi Model Kedua

Analisis regresi model kedua dilakukan untuk menganalisis sejauhmana kekuatan dan hubungan dari masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat. Adapun persamaan struktur dari analisis regresi model pertama adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Poverty\ Reduction = b_1\ Aksesibilitas + b_2\ Ketersediaan + b_3\ Penggunaan + b_4\ Performance\ Financial + e_2}$$

Adapun hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas (aksesibilitas, ketersediaan, penggunaan dan *performance financial*) terhadap variabel terikat (*poverty reduction*).

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,794	,059		81,356	,008
Access	,565	,017	,730	32,431	,020
Avail	-,087	,009	-,178	-9,174	,069
Usefull	-,004	,001	-,020	-3,110	,198
Asset	,020	,005	,088	4,093	,153

a. Dependent Variable: Pro_Reduc

Dari hasil pengujian tersebut, terlihat persamaan regresi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

$$Y_2 = 4,794 + 0,565 X_1 - 0,087 X_2 - 0,004 X_3 + 0,020 X_3 + e_2$$

Keterangan :

$Y_1 = Poverty Reduction$

$X_1 = Aksesibilitas$

$X_2 = Ketersediaan$

$X_3 = Penggunaan$

$X_4 = Aset (Performance Financial)$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial atau secara individual, keseluruhan variabel bebas (aksesibilitas) berpengaruh terhadap variabel *poverty reduction*, sementara variabel bebas lainnya tidak berpengaruh. Variabel aksesibilitas dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **0,565** dan nilai signifikan **0,020 < 0,05**, yang artinya Aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap *poverty reduction*. Variabel ketersediaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,087** dan nilai signifikan **0,069 > 0,05**, yang artinya Ketersediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *poverty reduction*.

Variabel penggunaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,004** dan nilai signifikan **0,198 > 0,05**, yang artinya Penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *poverty reduction*. Variabel *performance financial* dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,020** dan nilai signifikan **0,153 > 0,05**, yang artinya *Performance financial* tidak berpengaruh signifikan terhadap *poverty reduction*.

Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) model kedua, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana dan seberapa besar kemampuan variabel bebas (aksesibilitas, ketersediaan, penggunaan dan *performance financial*) secara keseluruhan dalam menjelaskan variabel *poverty reduction*, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,00048

a. Predictors: (Constant), Asset, Usefull, Avail, Access

Sumber : data primer diolah, 2018

Hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa besarnya ***R Square*** adalah **1,000** atau **100%**. Dengan demikian variabel *poverty reduction* dapat dijelaskan oleh variabel aksesibilitas, ketersediaan, penggunaan dan *performance financial* sebesar **100%** dan tidak ada dijelaskan oleh variabel diluar model tersebut.

5. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linier berganda, dimana analisis regresi dilakukan sebanyak dua kali. Analisis regresi yang pertama adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel mediasi, sementara analisis regresi model kedua dilakukan untuk membuktikan kekuatan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan uji t pada regresi model pertama, diperoleh nilai *unstandardized coefficient beta* variabel aksesibilitas sebesar **2,381**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P1. Nilai *unstandardized coefficient beta* variabel ketersediaan sebesar **-0,749**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P2. Variabel penggunaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **0,130**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P3.

Kemudian berdasarkan pada uji t regresi model kedua, variabel aksesibilitas dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **0,565**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P4. Variabel ketersediaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,087**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P5. Variabel penggunaan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,004**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P6. Variabel *performance financial* dengan nilai *unstandardized coefficient beta* sebesar **-0,020**, nilai ini merupakan nilai *path* atau jalur P7.

Adapun uji koefisien determinasi pada regresi model pertama, diperoleh nilai $e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{(1 - 0,917)} = \sqrt{(0,083)} = 0,288$. Dengan demikian, maka pengaruh kausal empiris antara variabel aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan terhadap *performance financial* dapat dilihat pada persamaan struktural pertama, yaitu :

$$\mathbf{Performance\ Financial = b_1\ Aksesibilitas + b_2\ Ketersediaan + b_3\ Penggunaan + e_1}$$

atau

$$\mathbf{Performance\ Financial = 2,381\ Aksesibilitas - 0,749\ Ketersediaan + 0,130\ Penggunaan + 0,288\ e_1}$$

Adapun uji koefisien determinasi pada regresi model kedua, diperoleh nilai $e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{(1 - 1,000)} = \sqrt{(0)} = 0$. Dengan demikian, maka pengaruh kausal empiris antara variabel aksesibilitas,

ketersediaan, penggunaan dan *performance financial* terhadap *poverty reduction* dapat dilihat pada persamaan struktural kedua, yaitu :

$$\text{Poverty Reduction} = b_1 \text{ Aksesibilitas} + b_2 \text{ Ketersediaan} + b_3 \text{ Penggunaan} + b_4 \text{ Performance Financial} + e_2$$

atau

$$\text{Poverty Reduction} = 0,565 \text{ Aksesibilitas} - 0,087 \text{ Ketersediaan} - 0,004 \text{ Penggunaan} + 0,020 \text{ Performance Financial} + 0 e_2$$

Model	<i>Unstandardized Coefficient Beta</i>	t	Sig.	R ²
Persamaan Struktural 1 (X ₁ ,X ₂ ,X ₃ ke Y ₁)				
X ₁ =P1 X ₁	2,381	1,319	0,318	
Y ₁				
X ₂ =P2 X ₂	-0,749	-0,609	0,605	0,9
Y ₁				17
X ₃ =P3 X ₃	0,130	0,917	0,456	
Y ₁				
Persamaan Struktural 2 (X ₁ ,X ₂ ,X ₃ ,X ₄ ke Y ₂)				
X ₁ =P4 X ₁	0,565	32,431	0,020	
Y ₂				
X ₂ =P5 X ₂	-0,087	-9,174	0,069	1,0
X ₂ Y ₂				00
X ₃ =P6 X ₃	-0,004	-3,110	0,198	
X ₃ Y ₂				
Y ₁ =P7 Y ₁	0,020	4,093	0,153	

 Y_2

Penjelasan model jalur secara langsung dan tidak langsung variabel *exogenous* dan tidak langsung variabel *exogenous* terhadap variabel *endogenous*.

a. Pengaruh Aksesibilitas terhadap *Poverty Reduction*

Pengaruh Langsung (X_1Y_2) = 0,565

Pengaruh tidak Langsung (melalui *Performance Financial*)

$$X_1*Y_1 = (2,381)*(0,020) = 0,047$$

Jika pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, dapat dijelaskan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah tidak langsung atau dapat dikatakan variabel *mediating*.

Hasil menunjukkan bahwa Aksesibilitas tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap *Poverty Reduction* melalui *Performance Financial* sebagai variabel *intervening*, ini dibuktikan dengan nilai *direct effect* lebih besar daripada *indirect effect* ($0,612 > 0,047$).

b. Pengaruh Ketersediaan terhadap *Poverty Reduction*

Pengaruh Langsung (X_2Y_2) = -0,087

Pengaruh tidak Langsung (melalui *Performance Financial*)

$$X_2*Y_1 = (-0,749)*(0,020) = -0,014$$

Jika pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, dapat dijelaskan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah tidak langsung atau dapat dikatakan variabel *mediating*.

Hasil menunjukkan bahwa Ketersediaan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap *Poverty Reduction*

melalui *Performance Financial* sebagai variabel *intervening*, ini dibuktikan dengan nilai *direct effect* lebih besar daripada *indirect effect* ($-0,101 > -0,014$).

c. Pengaruh Penggunaan terhadap *Poverty Reduction*

Pengaruh Langsung (X_3Y_2) = $-0,004$

Pengaruh tidak Langsung (melalui *Performance Financial*)

$X_3*Y_1 = (0,130)*(0,020) = 0,002$

Jika pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, dapat dijelaskan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah tidak langsung atau dapat dikatakan variabel *mediating*.

Hasil menunjukkan bahwa Penggunaan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap *Poverty Reduction* melalui *Performance Financial* sebagai variabel *intervening*, ini dibuktikan dengan nilai *direct effect* lebih besar daripada *indirect effect* ($-0,002 > 0,002$).

Lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Variabel	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>	Total	Kriteria	Kesimpulan
1	Aksesibilitas	0,565	0,047	0,612	<i>Direct effect > indirect effect = intervening</i>	<i>Poverty reduction</i> bukan sebagai variabel <i>intervening</i>
2	Ketersediaan	-0,087	-0,014	-0,101	<i>Direct effect > indirect effect =</i>	<i>Poverty reduction</i> bukan sebagai

					<i>intervenin</i>	variabel
					<i>g</i>	<i>intervening</i>
					<i>Direct</i>	<i>Poverty</i>
					<i>effect ></i>	<i>reduction</i>
3	Penggunaan	-0,004	0,002	-0,002	<i>indirect</i>	bukan
					<i>effect =</i>	sebagai
					<i>intervenin</i>	variabel
					<i>g</i>	<i>intervening</i>

Berdasarkan tabel di atas, pengaruh tidak langsung variabel aksesibilitas (X_1) terhadap variabel *poverty reduction* (Y_2) melalui variabel *performance financial* (Y_1) sebesar $0,047 <$ pengaruh langsung variabel aksesibilitas (X_1) terhadap variabel *poverty reduction* (Y_2) yaitu sebesar $0,565$.

Pengaruh tidak langsung variabel ketersediaan (X_2) terhadap variabel *poverty reduction* (Y_2) melalui variabel *performance financial* (Y_1) sebesar $-0,014 <$ pengaruh langsung variabel ketersediaan (X_2) terhadap variabel *poverty reduction* (Y_2) yaitu sebesar $-0,087$.

Pengaruh tidak langsung variabel penggunaan (X_3) terhadap variabel *poverty reduction* (Y_2) melalui variabel *performance financial* (Y_1) sebesar $0,002 <$ pengaruh langsung variabel penggunaan (X_3) terhadap variabel *poverty reduction* (Y_2) yaitu sebesar $-0,004$.

Dengan demikian, diketahui bahwasannya variabel aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan tidak berpengaruh terhadap *poverty reduction* melalui *performance financial*. Disimpulkan bahwa *performance financial* tidak menjadi variabel *intervening* antara

aksesibilitas terhadap *poverty reduction*, ketersediaan terhadap *poverty reduction*, dan penggunaan terhadap *poverty reduction*.

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap *Performance Financial*

Diperoleh hasil penelitian, bahwasannya aksesibilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *performance financial*, hal ini dikarenakan nilai signifikansi ($p.0,318 > 0,05$). Hal ini dikarenakan faktor kinerja keuangan yang paling berefek bukan dari aksesibilitas masyarakat, namun kinerja keuangan IKNB lebih pada faktor pendapatan IKNB, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, *leverage*.

Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas bukanlah merupakan faktor yang sangat strategis mempengaruhi kinerja keuangan, karena aksesibilitas yang terpenting adalah ekuitas yang berdampak pada peningkatan pelayanan, pembukaan layanan baru, promosi produk dan area pemasaran.

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap *Performance Financial* dengan *Poverty Reduction* sebagai Variabel *Intervening*

Pada model penelitian ini, *poverty reduction* tidak memediasi hubungan antara aksesibilitas terhadap *performance financial*, *poverty reduction* tidak mengakibatkan aksesibilitas mempengaruhi *performance financial* secara tidak langsung. Ini ditunjukkan dari nilai pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) aksesibilitas nilainya lebih kecil terhadap *performance financial* dari nilai pengaruh langsung (*direct effect*) aksesibilitas terhadap *performance financial*.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, aksesibilitas masyarakat tidak terfokus dikarenakan masyarakat yang harus miskin,

akan tetapi aksesibilitas dibutuhkan karena ketiadaan masyarakat miskin untuk memiliki akses kepada IKNB Syariah.

Pengaruh Ketersediaan Terhadap *Performance Financial*

Diperoleh hasil penelitian, bahwasannya ketersediaan tidak memiliki pengaruh terhadap *performance financial*, hal ini dikarenakan nilai signifikansi ($p.0,605 > 0,05$). Hal ini dikarenakan faktor kinerja keuangan yang paling berefek bukan dari ketersediaan layanan dan fasilitas, namun kinerja keuangan IKNB lebih pada faktor pendapatan IKNB, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, *leverage*.

Ini menunjukkan bahwa ketersediaan bukanlah merupakan faktor yang sangat strategis mempengaruhi kinerja keuangan, karena ketersediaan yang dibutuhkan adalah sarana dan fasilitas yang berdampak pada peningkatan pelayanan, pembukaan layanan baru bagi masyarakat yang akan mengakses IKNB Syariah.

Pengaruh Ketersediaan Terhadap *Performance Financial* dengan *Poverty Reduction* sebagai Variabel *Intervening*

Pada model penelitian ini, *poverty reduction* tidak memediasi hubungan antara ketersediaan terhadap *performance financial*, *poverty reduction* tidak mengakibatkan ketersediaan mempengaruhi *performance financial* secara tidak langsung. Ini ditunjukkan dari nilai pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) ketersediaan nilainya lebih kecil terhadap *performance financial* dari nilai pengaruh langsung (*direct effect*) ketersediaan terhadap *performance financial*.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, ketersediaan masyarakat tidak terfokus pada banyaknya jumlah dan jaringan IKNB Syariah yang ada, akan tetapi ketersediaan dibutuhkan karena

ketiadaan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin untuk menggunakan IKNB Syariah.

Pengaruh Penggunaan Terhadap *Performance Financial*

Diperoleh hasil penelitian, bahwasannya penggunaan tidak memiliki pengaruh terhadap *performance financial*, hal ini dikarenakan nilai signifikansi ($p.0,456 > 0,05$). Hal ini dikarenakan faktor kinerja keuangan yang paling berefek bukan dari ketersediaan layanan dan fasilitas, namun kinerja keuangan IKNB lebih pada faktor pendapatan IKNB, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, *leverage*.

Ini menunjukkan bahwa penggunaan bukanlah merupakan faktor yang sangat strategis mempengaruhi kinerja keuangan, karena penggunaan adalah sampai sejauhmana kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan untuk menggunakan sarana dan fasilitas yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang akan mengakses IKNB Syariah.

Pengaruh Penggunaan Terhadap *Performance Financial* dengan *Poverty Reduction* sebagai Variabel *Intervening*

Pada model penelitian ini, *poverty reduction* tidak memediasi hubungan antara penggunaan terhadap *performance financial*, *poverty reduction* tidak mengakibatkan penggunaan mempengaruhi *performance financial* secara tidak langsung. Ini ditunjukkan dari nilai pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) penggunaan nilainya lebih kecil terhadap *performance financial* dari nilai pengaruh langsung (*direct effect*) penggunaan terhadap *performance financial*.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, penggunaan masyarakat terhadap produk dan fasilitas IKNB Syariah yang ada,

tidak harus menunggu kebutuhan masyarakat miskin untuk menggunakan IKNB Syariah.

Pengaruh *Performance Financial* Terhadap *Poverty Reduction*

Diperoleh hasil penelitian, bahwasannya *performance financial* tidak memiliki pengaruh terhadap *poverty reduction*, hal ini dikarenakan nilai signifikansi ($p.0,153 > 0,05$). Hal ini dikarenakan faktor kinerja keuangan yang paling berefek bukan dari ketersediaan layanan dan fasilitas, namun kinerja keuangan IKNB lebih pada faktor pendapatan IKNB, struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, *leverage*.

Ini menunjukkan bahwa *performance financial* bukanlah merupakan faktor yang utama mempengaruhi *poverty reduction*, karena *performance financial* adalah indikator IKNB Syariah mengalami peningkatan aset dan pendapatan yang meningkat, hal ini dilihat dari sejauhmana peningkatan ROI dan ROA. Dampaknya pada *poverty reduction* harus diutamakan pada sektor keuangan daerah yang baik, yang dilihat dari PDB dan GDP serta pertumbuhan dan pendapatan daerah.

Keuangan inklusif—melalui akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran—akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pasar keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

Mensinergikan upaya tersebut diperlukan adanya strategi nasional keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi panduan bagi semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap sektor keuangan formal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam mengembangkan strategi nasional, keuangan inklusif harus difokuskan pada aspek manusianya dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul serta menghilangkan berbagai faktor yang menjadi penghambat upaya tersebut. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan.

Selain itu, pihak swasta juga dapat melihat bahwa terdapat celah pasar yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan bila mereka dapat diraih lewat berbagai strategi yang inovatif. Dalam implementasinya, keuangan inklusif tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM.

Oleh karena itu, keuangan inklusif harus dilihat atau diposisikan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan perekonomian nasional dan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan harus mampu memadukan antara sosial inklusif, keuangan inklusif dan ekonomi inklusif. Sosial inklusif memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat menyangkut kebutuhan dasar, khususnya bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan mobilisasi sosial, seperti

yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakatnya.

Keuangan inklusif memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat. Sedangkan ekonomi inklusif bertujuan untuk memberikan peluang atau akses terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, seperti pemberdayaan UMKM. Dalam kaitannya dengan penyusunan strategi nasional keuangan inklusif, peran Kementerian Keuangan dalam strategi keuangan inklusif sangatlah penting, khususnya terkait dengan penyediaan pembiayaan mikro bagi UMKM yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan formal.

Akan tetapi, peranan ini belum terekspos optimal dalam strategi nasional keuangan inklusif yang disusun oleh Bank Indonesia karena fokus utamanya adalah mendorong peranan sektor perbankan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam sektor keuangan formal yang menjadi *domain* dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada strategi nasional yang dimaksud dengan memberikan fokus dan porsi yang lebih besar kepada pemberdayaan lembaga keuangan nonbank dalam menyediakan pembiayaan UMKM.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Pegadaian untuk menghapus monopoli PT Pegadaian dengan memberikan izin dan akses bagi swasta untuk membuka pegadaian swasta, bersama Bank Dunia sedang melakukan kajian pengembangan dan penguatan perusahaan modal ventura, dan melakukan sosialisasi peraturan tentang perusahaan penjaminan.

Untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kelebihan likuiditas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi ritel dan sukuk ritel dengan nominasi yang lebih terjangkau untuk memberikan alternatif pilihan investasi bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas selain dari tabungan, deposito, reksadana, dan saham.

Penutup

Hasil penelitian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan masyarakat terhadap produk dan fasilitas IKNB Syariah, tidak harus menunggu kebutuhan masyarakat miskin untuk mengajukan IKNB Syariah. Keterbatasan dan Saran penelitian yaitu peningkatan inklusi keuangan dengan mediasi dan literasi serta sosialisasi kepada masyarakat berpendapatan di bawah rata-rata dengan memberikan dan menyiapkan produk pilihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Industri Keuangan non Bank Syariah setidaknya memiliki pangsa produk-produk sosial yang bermanfaat bagi masyarakat miskin dengan berorientasi pada skala non profit dan dengan menggunakan akad kebajikan. Peneliti-peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel mediasi dan variabel intervening selain variabel pada penelitian ini, seperti variabel *leverage*, *capital structure*, *size company*, serta variabel lainnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Anas Iswanto, Paulus Uppun, Indraswati Tri Abdi Reviani, 2016, The Role of Financial Inclusion to Poverty Reduction in Indonesia, *OSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, e-ISSN: 2278-

487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 6 .Ver. III (Jun. 2016), PP 37-39.

Avais, Mohammed, 2014, Financial Innovation and Poverty Reduction, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 4, Issue 1, January 2014, ISSN 2250-3153.

Chen, Haiyang & Ronald P. Volpe. 1998. An Anaysis of Personal Finacial Literacy Among College Student. *Financial Services Review*. 7 (2). 107-128.

Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah OJK Moch Muchlasin, penjelasan disampaikan pada Nangkring dan Buka Puasa bareng OJK 'Saatnya Lebih Dekat dengan Keuangan Syariah' bertujuan mengenal lebih dekat blogger. Event yang dilaksanakan pada 18 Juni 2017 di *Double Tree* Cikini tersebut merupakan kerja sama OJK dengan Kompasiana. https://www.kompasiana.com/coconascookies/tantangan-dan-peluang-industri-keuangan-syariah-indonesia_594665c17aafb25b26441a52. diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Effendi, Tadjuddin Noer, 1993, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Engelbrecht, L. 2008. *The Scope of Financial Literacy Education: A Poverty Alleviation Tool in Social Work?*. Social Work/Maatskaplike Werk, pp. 44(3).

Faboyede, Olusola Samuel, Egbide Ben-Caleb, Babajide Oyewo dan Adekemi Faboyede, 2015, Financial Literacy Education: Key To Poverty Alleviation and National Development in Nigeria, *European Journal Accounting Auditing and Finance Research*, Published by European Centre for Research Training and Development UK, Vol.3, No.1, pp.20-29, January 2015.

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo, Alfabeta, 2

Finmark Trust. 2007. *Access to Savings Products in The Low Income Market*. Johannesburg: South Africa Savings Institute.

- Industri Keuangan non Bank Syariah, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 239.
- Laderchi, C.E., Saith, R. & Stewart, F. 2006. *Does the Definition of Poverty Matter? Comparing Four Approaches*. International Poverty Centre, UNPD, Poverty in focus, December: 10-11.
- Link, P., Vawser, S., Downes, S. & Chant, G. 2004. *Summary Presentation: Research on Financial Exclusion in Australia*. Victoria, Australia: ANZ, Chant Link & Associates.
- Manurung, Jonni J. dan Adler H. Manurung, 2009. *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 31.
- Noble, M., Ratcliffe, A. & Wright, G. 2004. *Conceptualizing, Defining and Measuring Poverty in South Africa – An Argument for a Consensual Approach*. Centre for the Analysis of South African Social Policy (CASASP), Department of Social Policy and Social Work. Oxford: University of Oxford.
- Prastyo, A. Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Sandlant, R., Harris, A. & Barker, N. 2005. *AZN Survey of Adult Financial Literacy in Australia*. Melbourne: AZN & ACNielsen.
- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), h.20.
- Sevim, Nurdan, Fatih Temizel & Ozlem Sayılır. 2012. The Effects of Financial Literacy on The Borrowing Behaviour of Turkish Financial Consumers. *International Journal of Consumer Studies*, 36 (5), 573–579. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01123.x>

- Srimindarti, C.. 2006. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*, STIE Stikubank, Semarang. 34.
- Sugiyono. 2004. *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia, Yogyakarta, 53.